

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember

Analysis Of Factors Affecting Tax Revenue District Jember

Yohan Dwi Artha, Badjuri, Zainuri
Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: dwiarthayohan@yahoo.com

Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah perlu dilaksanakan sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan. Dengan sumber dana yang memadai, diharapkan proses pembangunan di daerah dapat terlaksana dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, PDRB, dan inflasi terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda (*Multiple Linier Regression Method*) dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS), jenis data yang digunakan adalah data sekunder meliputi jumlah penduduk, PDRB, inflasi tahun 1984-2013. Hasil analisa data dengan regresi linier berganda diperoleh hasil variabel jumlah penduduk dan PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, dan variabel inflasi memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Jumlah Penduduk, PDRB, Inflasi

Abstract

Taxes are one source of regional revenue (PAD), the largest. Efforts of local government to increase the regional tax revenue need to be implemented as one source of financing for development. With a adequate funding sources, it is expected the development process in the area can be accomplished and well-being of society as a whole will increase. This research aimed to know the the effect of the total population, of PDRB and inflation on the regional tax revenue Jember. The method used is multiple linear regression (Multiple Linear Regression Method) by the least squares method or ordinary least squares (OLS), the type of data used is secondary data include population, PDRB, inflation in 1984-2013. The results of the data analysis with multiple linear regression obtained variable results of the population and PDRB has a positive and significant impact on the the regional tax revenue, and variable inflation has a negative but insignificant effect on the regional tax revenue.

Keywords: Regional Taxes, Total Population, GDP, Inflation

Pendahuluan

Pembangunan merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan, yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan nasional. Bagi negara Indonesia Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memanfaatkan kekayaan alam setiap daerah secara optimal. Oleh karena itu, pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri (Ghofir, 2000).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru yang merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). Diberlakukannya undang-undang tentang

otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam mengelola sumber penerimaan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Artinya daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah dan ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin untuk menciptakan kemandirian daerah. Semakin besar penerimaan dari daerah sendiri, maka akan sangat memungkinkan daerah dalam mempercepat pembangunan di daerah untuk mensejahterakan penduduknya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan daerah otonom terdiri dari: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari: a. Pajak Daerah, b. Retribusi Daerah, c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, 2. Dana Perimbangan, 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan PAD dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan yang sepenuhnya dapat direncanakan dan direalisasi oleh pemerintah daerah, pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah dapat berbeda antara satu daerah dan daerah lain karena potensi yang berbeda. Selain itu, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bentuk peran serta masyarakat secara nyata dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Jaka Sriyana, 1999:4).

Penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan asli daerah (PAD). Hal ini terlihat pada penerimaan pajak daerah dan kontribusi pada setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember yaitu sebesar Rp 95.188.144.409 dan memiliki kontribusi terhadap penerimaan asli daerah (PAD) sebesar 30,87 %. Dengan besarnya penerimaan pajak daerah diharapkan dapat memaksimalkan pembiayaan pengeluaran pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Jember.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode yang menggambarkan permasalahan dan dianalisis menggunakan metode angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran, dan menampilkan hasilnya.

Unit analisis

Kajian penelitian ini meliputi jumlah penduduk, PDRB, dan Inflasi yang bertujuan untuk mengetahui manakah yang memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember dan BPS Jawa timur, serta Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Jember. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* periode 1984-2013.

Analisis Regresi

Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*) maka penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS). Metode ini diyakini mempunyai sifat-sifat yang ideal dan dapat diunggulkan, yaitu secara teknis sangat kuat, mudah dalam perhitungan dan penarikan interpretasinya (Gujarati, 1999:23).

Model Regresi

$$Y = f(X_1 X_2 X_3)$$

Dari model diatas kemudian ditransformasikan kedalam model ekonometrika, Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$PPD = \beta_0 + \beta_1(PDDK) + \beta_2(PDRB) + \beta_3(\text{Inf}) + e$$

Dimana:

PPD : Penerimaan Pajak Daerah

β_0 : Konstanta

$\beta_1\beta_2\beta_3$: Koefisien regresi parsial

PDDK : Jumlah penduduk

PDRB : PDRB

Inf : Inflasi

e : Error term

Ln : Logaritma Natural

Adanya perbedaan satuan hitung maka model diatas ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural yaitu:

$$\text{LnPPD} = \beta_0 + \beta_1(\text{LnPDDK}) + \beta_2(\text{LnPDRB}) + \beta_3(\text{Inf}) + e$$

Uji Hipotesis

1. Uji F

2. Uji t

3. Uji R²

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk melihat apakah nilai residual dari model yang dibentuk terdistribusi normal atau tidak. Konsep pengujian uji normalitas menggunakan pendekatan *Jarque Berra Test*. Pedoman dari J-B test adalah:

a) Jika nilai J-B hitung > nilai X² tabel atau probabilitas J-B hitung < nilai probabilitas ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual *error term* adalah berdistribusi normal ditolak.

b) Jika nilai J-B hitung < nilai X² tabel atau probabilitas J-B hitung > nilai probabilitas ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual *error term* adalah terdistribusi normal (Wardhono, 2004).

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan auxiliary regressions untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika R² regresi persamaan utama lebih besar dari R² auxiliary regressions maka di dalam model tidak terdapat multikolinearitas.

3. Uji Autokorelasi

Cara untuk menguji apakah dalam model mengandung autokorelasi yaitu dengan melakukan uji *Breuch-Godfrey* atau dengan nama lain uji *Langrange-Multiplier*. Metode ini didasarkan pada nilai F dan Obs*R-Squared, dimana jika

nilai probabilitas dari Obs*R-Squared melebihi tingkat kepercayaan $\alpha = 5\%$ maka dalam model yang digunakan tidak mengandung masalah autokorelasi.

4. Uji Heterokedastisitas

Cara untuk menguji apakah dalam model mengandung autokorelasi yaitu dengan melakukan uji white. Metode ini didasarkan pada nilai Obs*R-Squared dan , dimana jika nilai probabilitas dari Obs*R-Squared dan Prob. Chi-Square melebihi tingkat kepercayaan $\alpha = 5\%$ maka dalam model yang digunakan tidak mengandung masalah heterokedastisitas.

Hasil Penelitian

Analisis Regresi

Keterangan	Koef. Regresi	t _{hitung}	Prob.
C	-48.28127	-3.144209	0.0043
lnPDDK	6.915992	3.223053	0.0035
lnPDRB	0.650669	6.574203	0.0000
Inf	-0.003125	-0.999596	0.3271
		R-square	: 0.908137
		F-statistik	: 82.38165
		prob (F-stat)	: 0.000000

Berdasarkan hasil analisis melalui regresi linier berganda, maka dapat dirangkai suatu persamaan regresi yang dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{LnPPD} = -48,28127 + 6,915992(\text{lnPDDK}) + 0,650669(\text{lnPDRB}) - 0,003125(\text{inf}) + e$$

Berdasarkan analisis model regresi model penerimaan pajak daerah didapat informasi sebagai berikut:

- Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak daerah dengan nilai koefisien regresi sebesar 6,915992 .
- Variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.650669.
- Variabel inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dengan nilai koefisien sebesar -0.003125 .

Uji Statistik

Uji F

Ketiga variabel bebas yaitu jumlah penduduk, PDRB dan tingkat Inflasi secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Uji t

1. Secara parsial Variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember.

2. Secara parsial Variabel PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember.

3. Secara parsial Variabel inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember.

Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil estimasi regresi linier berganda diketahui bahwa determinasi dari persamaan model penerimaan pajak daerah adalah sebesar 0,908137 atau 90,8137%. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan variabel bebas (jumlah penduduk, PDRB, dan inflasi) secara bersama-sama mampu menerangkan variabel dependen (penerimaan pajak daerah) sebesar 90,8137% sedangkan selebihnya (9,1863%) diterangkan oleh variabel lain diluar model yang telah diestimasi.

Pembahasan

Dari pengujian yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi ketiga variabel bebas yaitu jumlah penduduk, PDRB dan tingkat Inflasi secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan uji statistik dan koefisien pada variabel jumlah penduduk, dapat diketahui bahwa variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah penduduk maka penerimaan pajak daerah akan mengalami peningkatan.

Berdasarkan uji t statistik dan koefisien pada variabel PDRB diketahui bahwa variabel PDRB mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa produk domestik bruto (PDRB) meningkat maka penerimaan pajak daerah juga akan meningkat.

Berdasarkan Uji t hipotesis dan koefisien pada variabel inflasi diketahui bahwa variabel inflasi memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi inflasi maka penerimaan pajak daerah akan menurun.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- Jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember.
- PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten jember.
- Tingkat inflasi memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember.

Saran

Dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pemerintah lebih meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan pemerintah daerah Kabupaten Jember yang meliputi akurasi data subjek dan objek pajak. Subjek dan objek pajak yang seharusnya dan belum terdaftar sebagai wajib pajak bisa terdaftar sebagai wajib pajak dengan cara melakukan sosialisasi dan pendataan ulang. Sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Meningkatkan sektor-sektor PDRB baik yang berhubungan langsung dan yang tidak berhubungan langsung dengan penerimaan pajak. Sehingga dapat menarik investor untuk membangun usaha di Kabupaten Jember. Dan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Jember untuk dapat menekan laju inflasi yang terjadi. Dengan menekan serendah-rendahnya tingkat inflasi diharapkan penerimaan pajak daerah dapat meningkat.

Daftar Pustaka

- [1] Abdul, Ghofir. 2000. *Optimalisasi Pajak Dalam Penerapan Otonomi Daerah*. Jakarta: Berita Pajak No. 15 Januari 2000.
- [2] Ajija, S. R., Wulansari, D., Setianto, R. H., dan Primanthi, M.R. 2011. *Cara Cerdas Menguasai EVIEWS*. Jakarta: Salemba Empat.
- [3] Badan Pusat Statistik. *Jawa Timur Dalam Angka berbagai edisi*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- [4] Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Jember Dalam Angka berbagai edisi*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.
- [5] Case, Karl E dan Ray C Fair. 2004. *Prinsip-Prinsip Ekonomi, Jilid 2 Edisi Kedelapan*. Jakarta: ERLANGGA
- [6] Dumairy(1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- [7] Gujarati, Damodar N dan Dawn C. Porter. 2015. *Dasar-dasar Ekonometrika, Buku 1 Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- [8] Gujarati, Damodar N dan Dawn C. Porter. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika, Buku 2 Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- [9] Jaka Sriyana. 1999. *Hubungan keuangan Pusat-Daerah, Reformasi Perpajakan dan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 4 No. 1 hal 312-323.
- [10] Jhingan, ML. 2002. *Ekonomi Pembanguna dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [11] Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori Masalah Kebijakan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- [12] Lincoln, Arsyad. 1999. *Ekonomi Pembangunan Edisi keempat*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- [13] Mankiew, N. Gregogry. 2006. *Makroekonomi, Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.
- [14] Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI
- [15] Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI
- [16] Musgrave, R. A. & Musgrave, P B. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, edisi V*. Alih Bahasa Alfonsus Sirait. 1993. Erlangga. Jakarta.
- [17] Sasana, Hadi. 2005. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan*. Dinamika Pembangunan Vol. 2 No. 1 Juli 2005 hal 19-29.
- [18] Sukirno, Sadono. 1994. *Pengantar Teori Makro Ekonomi, Edisi Kedua*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- [19] Sukirno, Sadono. 2002. *Teori Makro Ekonomi, Edisi Kedua*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- [20] Sutrisno P.H, 2002, *Dasar-Dasar Kebijakan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal*, BPFE, Yogyakarta.
- [21] Thomas Sumarsan. 2010. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [22] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah.
- [23] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
- [24] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- [25] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
- [26] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- [27] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- [28] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- [29] Waluyo dan Ilyas Wirawan B. 2007. *Perpajakan Indonesia, Edisi Ketujuh*. Jakarta: Salemba Empat.
- [30] Wardhono, A. 2004. *Mengenal Ekonometrika Teori dan Aplikasi. Edisi Pertama*. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.